

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DENGAN PEMBERIAN SANKSI EKONOMI**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui sanksi ekonomi dapat memberikan pengaruhnya terhadap sebuah negara yang terkena penjatuhan sanksi. Penjatuhan sanksi ekonomi yang diterapkan kepada Venezuela meliputi, sanksi ekspor dan impor, sanksi keuangan, sanksi perjalanan dan pembekuan aset yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela baik itu secara entitas negara maupun individu yang terdapat dalam lingkaran hitam presiden Nicolas Maduro.

#### **A. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Melalui Sanksi Ekonomi**

Sejak tahun 1945 negara-negara didunia telah menggunakan sanksi ekonomi sebagai instrumen dalam mencapai keamanan diplomatik maupun nasional mereka, Menurut Schott, Hufbauer dan Elliot yang dikutip secara luas tahun 1990, setidaknya negara yang memberlakukan sanksi ekonomi antara 1945 dan 1990 adalah sebanyak 91 kasus. Salah satunya seperti Amerika Serikat yang menerapkan sanksi ekonomi, baik secara mandiri maupun bersama dengan negara-negara lain, Amerika Serikat memiliki komitmen untuk menggunakan setiap alat diplomatik dan ekonomi yang tersedia dapat mempertanggungjawabkan tindakan para pejabat yang melakukan korupsi dan dukungan terhadap demokrasi. Sejak 1991, pemerintah Amerika Serikat telah secara signifikan meningkatkan penggunaan sanksi ekonomi, khususnya di

targetkan pada negara-negara yang mendukung terorisme internasional, pembuatan senjata pemusnah masal, penyalahgunaan politik dan hak sipil, pencucian uang dan perdagangan narkoba, dan penyitaan properti milik Amerika Serikat. (Alexander, 2009)

Menurut Gary Clyde Hufbauer, dari *Institute for International Economics*, mengatakan bahwa sejarah penggunaan sanksi Amerika Serikat untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, dimulai dengan keyakinan idealis Presiden Woodrow Wilson yang mengatakan bahwa sebuah negara yang diboikot adalah negara yang ingin menyerah. (Solveig & Daniel T, 1999)

Kontrol ekonomi menjadi salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang banyak dilakukan oleh Amerika Serikat, salah satunya melalui pemberlakuan kontrol dan sanksi ekonomi terhadap pasar dan mitra bisnis Amerika Serikat dengan cara melumpuhkan perdagangan negara target. Menurut definisi, setiap sanksi yang melarang perdagangan barang-barang dan pasar-pasar tertentu dapat memberikan kerugian bagi warga Amerika Serikat juga mitra dagang luar negeri, tetapi pemberian sanksi ekonomi dapat menjaga keamanan nasional dan dianggap sebagai pilihan yang terbaik, meski memerlukan pembiayaan yang sangat besar.

Meskipun begitu pemerintah Amerika Serikat secara rutin mengenakan sanksi perdagangan secara terus menerus meskipun terkadang permasalahan yang dihadapi tidak mengancam keamanan nasional negaranya. Pada dasarnya pemberlakuan sanksi ekonomi dan kontrol perdagangan memiliki resiko untuk menghilangkan peluang bisnis Amerika Serikat di pasar negara-negara berkembang seperti Cina, Indonesia, India, Turki dan Meksiko, hal tersebut membuat negara-negara berkembang mengalihkan investasinya ke tempat lain untuk menghindari kontrol ekspor yang dilakukan Amerika Serikat. Menurut Halliburton Company *Chief Executive Officer* dan mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Dick Cheney bahwa telah

banyak perubahan dramatis yang telah terjadi pada akhir abad ke-20, kemampuan ekonomi Amerika Serikat perlu dipandang sebagai aset strategis dunia yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi pasar. Sementara sanksi ekonomi sesuai dalam beberapa keadaan, sebagai upaya sebuah negara dalam menjatuhkan pengaruh negara-negara lain, yang jarang berhasil dalam memberlakukan sanksi ekonomi.

Sanksi perdagangan yang dijatuhkan Amerika Serikat bertindak secara mandiri, dalam melakukan pelarangan terhadap perdagangan dengan negara lain atau suatu komoditas tertentu. Sanksi unilateral dipertahankan oleh para pembuat kebijakan Amerika Serikat karena meyakini bahwa sanksi memiliki nilai dan syarat simbolis meskipun terkadang tidak efektif. (McMillin, 1990)

Penggunaan hambatan perdagangan dan keuangan sebagai senjata politik dimaksudkan untuk mendorong negara target, dan sebagai upaya bagi negara pengirim sanksi dalam mendapatkan keuntungan politik. Sanksi sendiri digunakan untuk mengeksploitasi satu kesamaan spesifik antar negara yang berdaulat, dengan mengeksploitasi kebutuhan negara target terhadap barang-barang tertentu seperti perang ekonomi, di mana pembatasan perdagangan digunakan sebagai pengganti senjata militer.

Beberapa jenis sanksi ekonomi yang sering digunakan oleh Amerika Serikat dalam melakukan kebijakan luar negerinya diantaranya adalah :

*Pertama* sanksi ekonomi yang bekerja dengan cara mengubah cara suatu negara secara konsumsi, kerja, dan penyelamatan. Sanksi ekonomi dapat bekerja dengan mengambil pajak dari rezim negara target dan masyarakatnya dan melibatkan para pemimpin secara langsung untuk melakukan perubahan, dengan syarat bahwa negara pengirim harus memiliki hubungan ekonomi dengan negara target untuk

memastikan bahwa sanksi yang ditujukan akan berjalan secara efektif.

*Kedua* sanksi ekonomi dapat dianggap sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang terletak pada suatu kontinum antara pertukaran internasional yang sepenuhnya tidak dibatasi dan perang absolut di pihak lain. Sanksi bukan pengganti langsung untuk perang tetapi sebagai alat diplomatik lain, sedangkan perang adalah akhir dari diplomasi. Pada dasarnya, sanksi tidak lebih dari kuota atau pembatasan jumlah pada barang, jasa, atau pembiayaan yang mengalir di antara kedua negara. Secara yuridis, sanksi adalah penghalang arus nontarif dalam perdagangan, impor, dan pengekangan ekspor, yang digunakan untuk mengubah pilihan politik negara target dibandingkan sebagai tujuan proteksionisme dalam negeri.

Galtung menguraikan tujuh dimensi untuk mengklasifikasikan sanksi, yang telah diparafrasekan:

1. Sanksi dapat berupa hadiah (positif) atau menghukum (negatif);
2. Sanksi ditujukan untuk individu atau kolektif;
3. Sanksi dikenakan karena tindakan internal atau eksternal oleh target;
4. Sanksi bersifat unilateral, multilateral atau universal;
5. Sanksi bersifat umum atau selektif;
6. Sanksi bersifat total atau sebagian; dan
7. Sanksi membatasi gabungan perdagangan, pembiayaan, komunikasi, dan hubungan diplomatik target. (Eyler, 2007)

## **B. Tipe-Tipe Sanksi Ekonomi yang Dijatuhkan Oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela**

### **1. Sanksi Ekonomi**

#### **a. Sanksi Ekspor**

Sanksi yang bersifat parsial dalam kasus-kasus tertentu, berfokus pada barang-barang spesifik milik negara target, dibandingkan dengan embargo yang bersifat komprehensif dan menyebabkan kerugian lebih besar, salah satunya dengan hilangnya kesejahteraan negara pengirim, yang diartikan bahwa produsen domestik tidak dapat memenuhi permintaan domestik dengan mudah lalu kemudian mengambil keuntungan dengan harga yang lebih tinggi. Produsen negara target mengalami kerugian karena kehilangan banyak pendapatan dari konsumen, sedangkan konsumen dalam negeri tetap dengan mudah menemukan barang pengganti. Harga yang relatif lebih rendah tidak meningkatkan surplus konsumen.

Sanksi ekspor dianalogikan dengan ekonomi negara pengirim yang memberikan pembatasan terhadap ekspor. Sanksi ekspor dapat membatasi penjualan barang yang digunakan dalam proses produksi, barang-barang ini berkisar dari otomotif, modal intelektual, perangkat lunak komputer hingga pabrik farmasi. Hilangnya modal fisik dari sumber asing mengurangi investasi dalam sektor makro ekonomi negara target.

Dalam sanksi ekspor, pasokan impor negara target akan terpengaruh, karena sanksi ekspor meningkatkan harga dunia, dan menimbulkan harga lebih tinggi dengan jumlah yang lebih rendah dalam perekonomian negara target. Perusahaan-perusahaan di negara target mendapat keuntungan dari sanksi ekspor, karena penjualan barang-barang yang diproduksi di

dalam negeri meningkat ketika perusahaan pengirim meninggalkan pasar tersebut. (Drezner, 1999)

Efek terhadap kesejahteraan kedua negara sama-sama tidak mendapatkan pengaruh apapun. Secara teoritis, sanksi ini memberikan ancaman dalam memperlambat pertumbuhan ekonomi negara target, yang lebih mengarah pada tingkat pertumbuhan yang menjadi lebih lambat, penurunan PDB, dan penurunan konsumsi.

Dengan mengurangi arus masuk ini juga dapat mengurangi kemampuan negara target untuk mengekspor barang. Akibatnya, pemegang aset asing menjual kepemilikannya kepada warga dan perusahaan domestik, yang berpotensi menyebabkan meningkatnya harga aset tanpa adanya pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela dengan memberikan sanksi ekspor, yang dikutip dari Lembar Fakta Biro Urusan Ekonomi Dan Bisnis tanggal 18 Desember 2018.

Amerika Serikat dengan lisensi umum yang luas mengotorisasi semua pembiayaan dan segala jenis transaksi dalam hutang baru terkait ekspor atau re-ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, peralatan medis, atau suku cadang pengganti dan komponen untuk perangkat medis, ke Venezuela, atau ke orang ketiga. negara-negara yang membeli secara khusus untuk dijual kembali ke Venezuela, dengan ketentuan bahwa ekspor atau ekspor ulang dilisensikan atau disahkan oleh Departemen Perdagangan. (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2017)

Hal tersebut menyebabkan banyak dari warga Venezuela mengalami kekurangan bahan pangan, kesehatan dan komoditi vital lainnya. Yang berakhir pada warga Venezuela memutuskan pergi meninggalkan negaranya, demi bisa bertahan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

## **b. Sanksi Perjalanan**

Penggunaan sanksi perjalanan, disebut juga sebagai *smart sanction*, terutama pada pemerintah negara target yang dianggap melakukan kejahatan seperti, memperoleh pendapatan dari pengeluaran pajak untuk kepentingan pribadi seperti menginap di hotel ataupun melakukan perjudian di kasino. Banyak negara berkembang, terutama Amerika Latin dan negara-negara kawasan Karibia, yang mengarahkan perekonomian negaranya pada bisnis sektor pariwisata di mana perjudian dan kehidupan malam yang dapat menarik ratusan ribu orang setiap tahun ke negara mereka. Kuba adalah salah satu contoh dari penggunaan sanksi perjalanan Amerika Serikat. Sanksi ini memberikan kerugian bagi kedua negara karena perdagangan tidak dapat mengalir dengan bebas.

Hal ini dapat mengurangi pendapatan negara target dari sektor wisata dan industri terkait, mulai dari hotel hingga transportasi ke tempat wisata hingga pasar makanan lokal. Juga, akan ada pengurangan jumlah mata uang asing dalam ekonomi negara target, dikarenakan mata uang asing seperti dollar Amerika Serikat adalah sebagai penggerak utama dalam transaksi luar negeri. Negara pengirim akan memanipulasi jumlah pasar negara target, dan mengakibatkan penurunan kesejahteraan bagi masyarakat negara target. (Eyler, 2007)

Sanksi perjalanan juga dijatuhkan Amerika Serikat kepada Venezuela dengan melarang warga Amerika untuk datang ke Venezuela, serta melalui pembatasan visa terhadap presiden Nicolas Maduro, istri, serta keluarganya dan pejabat yang berada pada lingkaran hitam. Seperti yang tertera pada Perintah Eksekutif 13692, tahun 2015 presiden mengeluarkan perintah eksekutif yang ditargetkan untuk sanksi pemblokiran aset dan pembatasan visa terhadap individu yang menghambat proses atau lembaga demokrasi, melakukan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, atau terlibat dalam korupsi. (Federal Register, 2015)

### **c. Sanksi Keuangan**

Sanksi keuangan disebut pula sebagai sanksi terhadap hak finansial atas pendapatan, perdagangan dan keuangan internasional secara intrinsik terkait melalui neraca pembayaran. Sanksi perdagangan secara tidak langsung mempengaruhi pasar dan barang negara target. Secara mekanis, sanksi keuangan mirip dengan sanksi perdagangan. Sanksi keuangan dijatuhkan melalui berbagai cara seperti mengurangi nilai perdagangan dengan menolak investasi, valuta asing serta kredit ke negara target. (Hufbauer, Elliott, Cyrus, & Winston, 1997)

Sanksi keuangan lebih efektif terhadap kerusakan publik, dan memiliki dampak langsung terhadap para elit penguasa ke mata uang asing, dengan konsentrasi hilangnya pendapatan kelompok elit yang mendapat manfaat dari kebijakan pemerintah target. (Gibson, Davis, & Radclif, 1997)

Ketika membatasi sumber pembiayaan domestiknya untuk ekonomi negara target, negara pengirim akan mengurangi pasokan dana, meningkatkan beban pembiayaan terhadap negara target. Untuk membatasi aliran pendapatan aset ke orang asing, negara pengirim harus memiliki prasyarat tertentu. Negara pengirim tidak dapat secara kredibel membatasi pendapatan aset negara target jika negara pengirim adalah kreditor negara target. Ancaman untuk pemberian sanksi ini hanya dapat dicapai jika negara pengirim memiliki lebih banyak aset di negara target. (Eyler, 2007)

Sanksi ini juga di berikan Amerika Serikat melalui surat perintah yang dilakukan secara bertahap, seperti yang tertera pada :

Perintah Eksekutif 13808 24 Agustus 2017, semua transaksi yang berkaitan dengan, penyediaan pembiayaan untuk, dan transaksi lainnya berikut, oleh orang Amerika



Serikat atau di dalam Amerika Serikat dilarang: *pertama*, hutang baru dengan jangka waktu lebih dari 90 hari dari Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), *kedua*, hutang baru dengan jangka waktu lebih dari 30 hari, atau ekuitas baru, dari Pemerintah Venezuela, selain hutang PdVSA yang dicakup oleh ayat (a) (i) bagian ini, *ketiga*, obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Venezuela sebelum tanggal efektif dari pesanan ini, *keempat*, pembayaran dividen atau distribusi keuntungan lainnya kepada Pemerintah Venezuela dari entitas yang dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pemerintah Venezuela.

- a. Pembelian, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang Amerika Serikat atau di Amerika Serikat, surat berharga dari Pemerintah Venezuela, selain surat berharga yang memenuhi syarat sebagai hutang baru dengan jangka waktu kurang dari atau sama dengan 90 atau 30 hari sejak dicakup oleh subbagian (Register, 2017)

Perintah Eksekutif 13827, 19 Maret 2018, menyebutkan bahwa, semua transaksi yang berkaitan dengan, penyediaan pembiayaan untuk, dan transaksi lainnya oleh orang Amerika Serikat atau di dalam Amerika Serikat, setiap mata uang digital, koin digital, atau token digital, yang dikeluarkan oleh, untuk, atau atas nama Pemerintah Venezuela pada atau setelah 9 Januari 2018, dilarang sejak tanggal efektif dari perintah ini.

Dilanjutkan pada Mei 21 2018, menyebutkan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan, penyediaan pembiayaan dan transaksi lain oleh orang Amerika Serikat atau di dalam Amerika Serikat dilarang meliputi, pembelian hutang piutang apa pun kepada Pemerintah Venezuela setiap hutang kepada Pemerintah Venezuela yang dijaminan jaminan setelah tanggal efektif dari pesanan ini, termasuk piutang dan penjualan, pemindahan, penugasan, atau penjaminan sebagai jaminan oleh Pemerintah, hutang baru dengan jangka waktu

lebih dari 90 hari dari Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), hutang baru dengan jangka waktu lebih dari 30 hari, atau ekuitas baru, dari Pemerintah Venezuela, selain hutang PdVSA yang dicakup pada bagian ini, obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Venezuela sebelum tanggal efektif dari perintah ini; atau pembayaran dividen atau distribusi keuntungan lainnya kepada Pemerintah Venezuela dari entitas yang dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pemerintah Venezuela.

Perintah Eksekutif 13850 pada 1 November 2018, Semua properti dan kepentingan di properti yang berada di Amerika Serikat, yang selanjutnya datang di Amerika Serikat, atau yang atau selanjutnya akan berada dalam kepemilikan atau kendali orang Amerika Serikat di mana orang berikut ini diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayar, diekspor, ditarik, atau sebaliknya ditangani: siapa pun yang ditentukan oleh Sekretaris Perbendaharaan, dalam konsultasi dengan Sekretaris Negara.

## **2. Pembekuan Aset**

Kegunaan lain dari sanksi keuangan adalah sebagai pencegahan dengan mengurangi atau menghilangkan aliran pendapatan aset negara target yang dipegang oleh ekonomi negara pengirim, dengan tujuan preventif. Seperti pembekuan aset yang digunakan untuk membatasi aliran pendapatan aset ke orang asing, kemungkinan negara target dapat terputus dari aliran pendapatan aset milik mereka sendiri, dalam hal bentuk barang. Pembekuan yang berarti mencegah penggunaan, perubahan, pergerakan, transfer atau akses aset, atau dalam hal aset ekonomi, menjual, menyewakan, atau menggadaikannya.

Untuk melakukan hal tersebut negara pengirim harus memiliki syarat tertentu, negara pengirim tidak dapat secara langsung membatasi pendapatan aset negara target jika itu adalah kreditor bersih negara target.

Pembekuan aset sangat terfokus pada tingkat individu atau organisasi, Jika investor individu kebetulan juga merupakan pembuat keputusan politik. Ancaman untuk membatasi aliran ini hanya dapat dilakukan jika negara pengirim memiliki lebih banyak aset di negara target. (Broek, Hazelhorst , & Zanger, 2010)

Membekukan aset individu dilakukan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pembuat keputusan dalam negara target, teroris, atau sumber pendanaan mereka, atau pelanggar lainnya yang dianggap layak mendapatkan sanksi. Biasanya pembekuan aset disebut pula sebagai *smart sanction* dimana dengan pemberlakuan sanksi yang benar, kerusakan yang dihasilkan dari penjatuhan sanksi ini dapat diminimalkan karena aset, pendapatan, dan kesejahteraan rakyat tidak akan tersentuh oleh kebijakan negara pengirim. Tidak ada jaminan mengenai jika sanksi dapat fokus pada penguasa negara target.

Seperti yang dilakukan Amerika Serikat melalui kantor Pengendalian Aset Asing (*OFAC*) Amerika Serikat, yang bertugas untuk mengatur sanksi seperti pembekuan aset dan penyitaan properti asing. menjelaskan bahwa penyitaan aset adalah sanksi yang sulit dalam praktik karena yurisdiksi menentukan bahwa negara yang menjatuhkan sanksi menggambarkan klaim keuangan sebagai hal kriminal. (Eyler, 2007)

Pembekuan aset yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap pejabat Venezuela berdasarkan pada beberapa tindakan yang dianggap merusak seperti menjadi bagian dari tokoh kunci jaringan korupsi seperti korupsi program bantuan pangan yang dikelola pemerintah Venezuela, melakukan eksploitasi dalam mendapatkan jabatan, terlibat dalam perdagangan narkoba, pencucian uang, penggelapan dana negara, tindakan penindasan, merusak proses atau lembaga demokrasi, tindakan kekerasan terhadap anggota oposisi, pelanggaran hak asasi manusia, melemahkan proses pemilihan, dan membatasi media.

Sebagai hasil dari penjatuhan sanksi ini, semua aset dari pejabat saat ini atau mantan pejabat pemerintah Venezuela yang tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat dibekukan, dan orang-orang Amerika Serikat dilarang berurusan dengan pejabat terkait.

Berikut ini adalah beberapa daftar pejabat pemerintah Venezuela yang mendapatkan hukuman penjatuhan sanksi dari Amerika Serikat.

### **C. Daftar pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi secara bertahap oleh Amerika Serikat**

#### **1. Pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada 9 Maret 2015**

Dibawah ini beberapa nama pejabat Venezuela yang mendapat penjatuhan sanksi oleh Amerika Serikat, dengan alasan penjatuhan sanksi karena terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan lawan politik, pembatasan kebebasan pers, penggunaan kekerasan terhadap demonstran yang melakukan protes antipemerintah, melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap pengunjuk rasa antipemerintah, serta tindakan yang memperburuk korupsi publik, diantaranya adalah :

Antonio José Benavides Torres, yang menjabat sebagai Komandan Daerah Strategis untuk Pertahanan Integral (REDI) Wilayah Tengah Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian Venezuela (FANB).

Gustavo Enrique González López, menjabat sebagai Direktur Jenderal Layanan Intelijen Nasional Bolivarian Venezuela (SEBIN) dan Presiden Pusat Strategis Keamanan dan Perlindungan Tanah Air (CESPPA) Presiden Venezuela.

Justo José Noguera Pietri, menjabat sebagai Presiden Perusahaan Venezuela Guayana (CVG), badan usaha milik negara.

Katherine Nayarith Haringhton Padron, menjabat sebagai Jaksa tingkat nasional Kantor Distrik ke 20 Kementerian Publik Venezuela.

Manuel Eduardo Pérez Urdaneta menjabat sebagai Direktur Polisi Nasional Bolivarian Venezuela.

Manuel Gregorio Bernal Martínez menjabat sebagai Kepala Brigade Lapis Baja ke-31 Caracas dari Tentara Bolivarian Venezuela, Miguel Alcides Vivas Landino menjabat sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian Venezuela (FANB). (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2015)

## **2. Pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada 8 September 2017**

Selanjutnya adalah beberapa nama pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada bulan September 2017, dengan masing-masing alasan yang berbeda-beda, diantaranya :

Francisco Jose Ameliach Orta, menjabat sebagai Konstituante *Asamblea Constituyente* untuk Kota Valencia di Negara Bagian Carabobo, dengan alasan penjatuhan sanksi karena berpartisipasi dalam tindakan atau kebijakan yang merusak proses atau lembaga demokrasi di Venezuela.

Dilanjutkan dengan 5 pejabat lain dengan alasan penjatuhan sanksi karena mengorganisir atau menciptakan AC (*Asamblea Constituyente*) melalui keterlibatan mereka dalam dua badan, Komisi Presidensial untuk AC (*Asamblea Constituyente*) dan Komando Konstituen Zamora 200, diantaranya :

Adan Coromoto Chavez Frias, menjabat sebagai Konstituante *Asamblea Constituyente* untuk kota Barinas di Negara Bagian Barinas, Erika del Valle Farias Pena menjabat sebagai Konstituen *Asamblea Constituyente* untuk Kota Ezequiel Zamora di Negara Bagian Cojedes, Carmen Teresa Melendez Rivas menjabat sebagai Konstituen *Asamblea Constituyente* untuk kota Iribarren di Negara Bagian Lara, Ramon Dario Vivas Velasco menjabat sebagai Konstituen *Asamblea Constituyente* untuk Kota Vargas di Negara Bagian Vargas, Hermann Eduardo Escarra Malave menjabat sebagai Konstituante *Asamblea Constituyente* untuk kota Zamora di Negara Bagian Miranda.

Kemudian Tania D'Amelio Cardiet menjabat sebagai Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (CNE), dengan alasan penjatuhan sanksi karena secara terbuka membela AC (*Asamblea Constituyente*) dan diyakini diantara pejabat CNE.

Bladimir Humberto Lugo Armas menjabat sebagai Komandan Unit Khusus ke Istana Legislatif Federal Pengawal Nasional Bolivarian Venezuela, dengan alasan penjatuhan sanksi karena terlibat dalam beberapa tindakan kekerasan terhadap anggota oposisi Majelis Nasional, termasuk serangan langsung terhadap presiden Majelis Nasional Julio Borges. (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2017)

### **3. Pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada 11 September 2017**

Selanjutnya adalah beberapa nama pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada bulan September 2017, dengan masing-masing alasan yang berbeda-beda, diantaranya :

Sandra Oblitas Ruzza, menjabat sebagai Wakil Presiden dan Rektor Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (CNE) dan Presiden Komisi Catatan Sipil dan Pemilihan yang

dikelola oleh CNE, dengan alasan penjatuhan sanksi karena mengumumkan relokasi TPS hanya empat hari sebelum pemilihan. Kegiatan ini mengganggu pemilihan, karena ketika pemilih tiba warga mendapati bahwa tempat pemungutan suara telah dipindahkan.

Socorro Elizabeth Hernandez De Hernandez menjabat sebagai Rektor CNE dan anggota Dewan Pemilihan Nasional Venezuela, dengan alasan penjatuhan sanksi karena terlibat dalam perubahan yang dilakukan pada lokasi TPS pada hari-hari sebelum pemilihan.

Carlos Enrique Quintero Cuevas, menjabat sebagai Rektor Alternatif CNE, dan anggota Dewan Pemilihan Nasional Venezuela, alasan penjatuhan sanksi yang tidak disebutkan.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua *Asamblea Constituyente* Venezuela, dengan alasan penjatuhan sanksi karena secara terbuka mengutuk gubernur terpilih yang menentang yang menolak untuk mengambil sumpah jabatan di hadapan AC (*Asamblea Constituyente*) yang tidak sah.

Julian Isaias Rodriguez Diaz, menjabat sebagai Duta Besar Venezuela untuk Italia, dengan alasan penjatuhan sanksi karena membatasi kebebasan pers dan menggunakan kontrol media oleh negara untuk membatasi proses pemilihan demokratis.

Jorge Elieser Marquez Monsalve, menjabat sebagai Menteri Kantor Kepresidenan Venezuela, dengan alasan penjatuhan sanksi karena menghapus dua saluran televisi Kolombia dari saluran Venezuela mengenai liputan mereka tentang mantan Jaksa Agung Venezuela Luisa Ortega Diaz, yang melarikan diri dari Venezuela.

Manuel Angel Fernandez Melendez, menjabat sebagai Presiden Perusahaan Telepon Nasional Venezuela (CANTV), dengan alasan penjatuhan sanksi karena CANTV dianggap

telah meningkatkan penyensoran secara drastis dan memblokir beberapa situs web dari publik Venezuela, termasuk situs web media sosial.

Carlos Alberto Osorio Zambrano, menjabat sebagai Presiden Organ Unggul Venezuela untuk Misi Transportasi, dengan alasan penjatuhan sanksi karena terlibat dalam menipu negara hingga \$ 573 juta melalui korupsi program pangan Venezuela.

Freddy Alirio Bernal Rosales, menjabat sebagai Menteri Pertanian Perkotaan Venezuela dan mengepalai Pusat Komando dan Kontrol Nasional untuk Komite Pasokan dan Produksi Lokal (CLAP), dengan alasan penjatuhan sanksi karena Sebelumnya ditunjuk oleh OFAC sebagai *Trafficker* Narkotika Khusus yang ditunjuk sesuai dengan Undang-Undang Penunjukan Kingpin Narkotika Asing pada 8 September 2011 untuk bertindak untuk atau atas nama Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC). (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2017)

#### **4. Pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada 5 Januari 2018**

Selanjutnya adalah beberapa nama pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada bulan Januari 2018, dengan masing-masing alasan yang berbeda-beda, diantaranya :

Rodolfo Clemente Marco Torres, yang menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian Aragua dan Direktur Eksternal Dewan Direksi Petr6leos de Venezuela dengan alasan penjatuhan sanksi karena diduga terkait dengan skema korupsi terkait impor makanan, yang dikendalikan oleh militer Venezuela.

Francisco Jose Rangel Gomez, menjabat sebagai Mantan Gubernur Negara Bagian Bolivar dan pensiunan



Tentara Nasional, dengan alasan penjatuhan sanksi karena dianggap sebagai pejabat militer yang diduga melakukan tindakan korupsi.

Fabio Enrique Zavarse Pabon, yang menjabat sebagai Divisi Jenderal Pengawal Nasional Bolivarian, dengan alasan penjatuhan sanksi karena diduga bertanggung jawab atas tindakan represi oleh anggota Garda Nasional Bolivarian terhadap demonstran jalanan di Venezuela.

Gerardo Jose Izquierdo Torres, yang menjabat sebagai Mayor Jenderal Angkatan Darat, Menteri Negara untuk Perbatasan Damai Baru dan Sekretaris Eksekutif Komisi Perbatasan Presiden dengan alasan penjatuhan sanksi karena diduga menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan dari tindak korupsi dengan mengorbankan rakyat Venezuela. (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2018)

## **5. Pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada 19 Maret 2018**

Selanjutnya adalah beberapa nama pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada bulan Maret 2018, dengan masing-masing alasan yang berbeda-beda, diantaranya :

Américo Alex Mata García (Mata), menjabat sebagai Direktur Pengganti pada Dewan Bank Nasional Perumahan dan Habitat, juga dikenal sebagai BANAVIH, dengan alasan penjatuhan sanksi karena diduga meminta dan menerima pembayaran dari Odebrecht, sebuah perusahaan konstruksi Brasil yang masuk dalam skandal korupsi di seluruh dunia.

Willian Antonio Contreras (Contreras), menjabat sebagai Kepala, atau Pengawas Nasional, dari Pengawas untuk Pertahanan Hak-hak Sosial-Ekonomi (SUNDDE), dengan alasan penjatuhan sanksi karena melakukan kontrol harga terus-menerus terhadap bisnis mulai dari supermarket hingga

perusahaan multinasional, dan telah memperlambat produksi atau berhenti beroperasi.

Nelson Reinaldo Lepaje Salazar (Lepaje), menjabat sebagai Kepala Kantor Perbendaharaan Nasional Venezuela dengan alasan penjatuhan sanksi karena terlibat dalam pengawasan prosedur administrasi dan penandatanganan dokumen resmi dalam perjanjian keuangan antara Kementerian Kekuatan Populer, Bank Sentral Venezuela, dan setiap negara atau lembaga keuangan asing.

Carlos Alberto Rotondaro Cova (Rotondaro), menjabat sebagai Mantan Presiden Dewan Direksi Institut Jaminan Sosial Venezuela (IVSS), dengan alasan penjatuhan sanksi karena diduga mengakibatkan negara Venezuela tidak lagi membeli obat-obatan asing yang cukup atau memproduksi obat-obatan sendiri. (TREASURY U. D., 2018)

## **6. Pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada 18 Mei 2018**

Selanjutnya adalah beberapa nama pejabat Venezuela yang dijatuhi sanksi pada bulan Mei 2018, dengan masing-masing alasan yang berbeda-beda, diantaranya :

Diosdado Cabello Rondón, yang menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama *Partido Socialista Unido de Venezuela* dengan alasan penjatuhan sanksi karena melakukan pencucian uang dan ekspor mineral ilegal, serta terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan narkoba.

José David Cabello Rondón, menjabat sebagai Kepala Bagian *Servicio Nacional Integrado de Administracion Aduanera y Tributaria*, dengan alasan penjatuhan sanksi melakukan pemerasan keuntungan dari Bea Cukai dan Administrasi Pajak Venezuela, serta menyetujui skema pencucian uang berdasarkan kegiatan pasar gelap yang

menargetkan perusahaan minyak milik negara Venezuela, *Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA)*.

Rafael Alfredo Sarria Diaz, dengan alasan penjatuhan sanksi Melakukan pencucian uang bagi pejabat Venezuela dengan cara membeli *real estate* sejak 2010. Memiliki hubungan bisnis dengan Cabello sebagai *frontman* utamanya, serta mendapatkan keuntungan pribadi dari korupsi dan hasil ilegal.

Marleny Josefina Contreras Hernández, menjabat sebagai Presiden Institut Nasional Pariwisata Venezuela dengan alasan penjatuhan sanksi merupakan istri dari Diosdado Cabello Rondón. (U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2018)

